

Pemprov DKI Jakarta Siapkan Dana Talangan BPJS Sebesar Rp93 Miliar



Ilustrasi (sumber: merdeka.com)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengantisipasi naiknya tunggakan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyatakan bahwa dana talangan tersebut digunakan untuk menjaga stabilitas keuangan RSUD yang berpotensi terganggu akibat tunggakan dana BPJS yang belum cair. “Kalau di Jakarta tentang pembayaran dari BPJS yang belum terselesaikan, kami siapkan *bridging* (dana talangan) dari Bank DKI sehingga bisa menangani kekurangan sampai dengan pembayaran tuntas. Itu sudah kita jalankan sejak tahun lalu”, jelas Anies.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta bekerja sama dengan Bank DKI telah menyiapkan kredit *Supply Chain Financing* (SCF) senilai Rp93 miliar yang akan disalurkan kepada enam RSUD di DKI Jakarta. Pihak Bank DKI merinci dana talangan tersebut akan disalurkan kepada RSKD Duren Sawit sebesar Rp5 miliar, RSUD Budhi Asih sebesar Rp15 miliar, RSUD Koja sebesar Rp20 miliar, RSUD Pasar Rebo sebesar Rp18 miliar, RSUD Tarakan sebesar Rp15 miliar, dan RSUD Cengkareng sebesar Rp20 miliar.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti menyatakan bahwa kredit SCF merupakan dana talangan atau dana cadangan untukantisipasi adanya masalah pembiayaan di rumah sakit. “Bila itu terjadi maka kita harapkan dengan adanya bantuan kredit ini, layanan kesehatan kita tidak terganggu. Kita tahu bahwa BPJS Kesehatan melalui program JKN (Jaminan

Kesehatan Nasional) ada sedikit kendala pencairan sehingga kita perlu antisipasi ke depannya”, jelas Widyastuti. Namun, Widyastuti tidak merinci jumlah tunggakan yang pernah terjadi selama program BPJS Kesehatan berlangsung.

Penandatanganan perjanjian kredit SCF tersebut dilakukan oleh Direktur Kredit UMK dan Usaha Syariah Bank DKI, Babay Parid Wazdi, sejumlah Direktur RSUD, dan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini menyatakan telah menyiapkan dana talangan bagi rumah sakit umum daerah (RSUD) di DKI Jakarta guna merespons kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan hingga 100 persen. Dana tersebut bersifat cadangan atau talangan sehingga baru dapat digunakan ketika RSUD atau RSKD membutuhkannya.

Herry menjelaskan bahwa tujuan pemberian kredit kepada RSUD ini adalah sebagai dukungan lembaga keuangan demi kelancaran kegiatan operasional rumah sakit untuk meningkatkan fungsi pelayanan publik. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk pembiayaan tagihan piutang klaim kepada BPJS Kesehatan. Bank DKI akan membayar tagihan klaim fasilitas kesehatan setelah tagihan diakseptasi oleh BPJS. Sementara, limit pembiayaan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing penyedia fasilitas kesehatan.

“Dengan pengelolaan *cash flow* yang lebih baik, sejumlah RSUD tersebut diharapkan dapat memberikan layanan kesehatan terbaik kepada masyarakat. Menjadi suatu kebanggaan dan kehormatan bagi Bank DKI untuk dapat memberikan jasa perbankan dalam bentuk SCF yang pada hari ini diawali dengan enam RSUD dan RSKD di Jakarta”, tambah Herry.

Sumber Berita:

1. detik.com, *Iuran BPJS Kesehatan Mau Naik, Anies Siapkan Dana Talangan Tunggakan*, 30 Agustus 2019;
2. era.id, *Cara Anies Talangi Defisit BPJS di Jakarta*, 30 Agustus 2019;
3. tribunnews.com, *Pemprov DKI Jakarta Talangi Tunggakan Dana BPJS Kesehatan ke RSUD*, 31 Agustus 2019;
4. merdeka.com, *Iuran BPJS Naik, Pemprov DKI Siapkan Dana Talangan Rp93Miliar untuk 6 RSUD*, 2 September 2019;
5. liputan6.com, *Iuran BPJS Naik, Pemprov DKI Siapkan Dana Talangan Rp93Miliar*, 2 September 2019.

Catatan:

- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan atau perusahaan asuransi yang sebelumnya bernama PT Askes, yang menyelenggarakan perlindungan kesehatan bagi para pesertanya.
Perlindungan kesehatan tersebut juga dapat diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan transformasi dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).
Kinerja BPJS diawasi oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).
- Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program pelayanan kesehatan dari Pemerintah dengan wujud BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan menggunakan sistem asuransi.
Melalui JKN, seluruh warga negara Indonesia berkesempatan memproteksi kesehatan dengan menyisihkan sebagian kecil uangnya untuk membayar iuran bulanan sebagai peserta. Iuran untuk warga miskin atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) akan ditanggung oleh Pemerintah.
- Dana talangan atau *bridging loan* adalah pinjaman jangka pendek yang digunakan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu sampai seseorang atau perusahaan mendapatkan pembiayaan permanen atau menghapus kewajiban yang ada.
Dana talangan bersifat jangka pendek, hingga satu tahun, memiliki suku bunga relatif tinggi dan biasanya didukung dengan beberapa bentuk jaminan.
- Program pembiayaan tagihan fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan atau *Supply Chain Financing* (SCF) merupakan program pembiayaan oleh kalangan perbankan yang khusus diberikan kepada fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan untuk membantu percepatan penerimaan pembayaran klaim pelayanan kesehatan melalui pengambilalihan *invoice* sebelum jatuh tempo pembayaran guna menjaga arus kas rumah sakit.